

Analisis Kinerja Penyuluh Kb Di Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Siantar Narumonda

Robert Siahaan¹, Jon Vilber Simanjuntak², Sondang Sidabutar³, Yunardi⁴,
Tatin Wahyanto⁵, Ibnu Jafar⁶

¹⁻⁶) Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Universitas Efarina
e-mail Koresponden: robertsiahaan2108@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Penyuluh KB dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siantar Narumonda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 10 informan yang terdiri atas pengelola Balai Penyuluhan KB, tenaga kesehatan, PPKBD, Sub-PPKBD, kader kelompok kegiatan, dan pihak terkait lainnya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Analisis kinerja mengacu pada lima indikator, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh KB secara umum cukup baik dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana. Kualitas kerja, kuantitas kerja, efektivitas, dan kemandirian menunjukkan capaian yang relatif positif, sedangkan ketepatan waktu masih memerlukan penguatan. Hambatan meliputi keterbatasan tenaga, kondisi geografis, transportasi, sarana dan prasarana, jaringan internet, pengelolaan data, serta keterlambatan pelaporan. Faktor pendukung meliputi kompetensi, motivasi, pengalaman, tanggung jawab, komunikasi, perencanaan, serta dukungan dari Balai Penyuluhan KB, kader, PPKBD, Sub-PPKBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa kinerja Penyuluh KB telah mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana, tetapi masih diperlukan penguatan pada aspek ketepatan waktu dan dukungan sumber daya.

Kata kunci: Kinerja, Penyuluh KB, Program Bangga Kencana

ABSTRACT

This study aimed to determine the performance of Family Planning Extension Workers in supporting the implementation of the Bangsa Kencana Program at the Family Planning Counseling Center in Siantar Narumonda District. This study used a qualitative approach involving 10 informants, consisting of Family Planning Counseling Center managers, health workers, PPKBD, Sub-PPKBD, activity group cadres, and other related parties. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, while data validity was ensured through triangulation. Performance was analyzed based on five indicators: work quality, work quantity, timeliness, effectiveness, and independence. The results showed that the overall performance of Family Planning Extension Workers was fairly good in supporting the implementation of the Bangsa Kencana Program. Work quality, work quantity, effectiveness, and independence showed relatively positive performance, while timeliness still required improvement. The main obstacles included limited personnel, geographical conditions, transportation, facilities and infrastructure, internet connectivity, data management, and delays in reporting. Supporting factors included competence, motivation, experience, responsibility, communication, planning, and support from the Family Planning Counseling Center, cadres, PPKBD, Sub-PPKBD, health workers, village government, and the community. The study concludes that the performance of Family Planning Extension Workers has supported the implementation of the Bangsa Kencana Program, but improvements in timeliness and resource support are still needed.

Keywords: *Performance, Family Planning Extension Workers, Bangsa Kencana Program*

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera (Yanti dkk., 2025). Pelaksanaan program tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Program Bangsa Kencana menggunakan pendekatan siklus kehidupan (*life cycle approach*) yang mencakup

intervensi sejak masa remaja, usia reproduksi hingga lanjut usia melalui berbagai kegiatan, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) (BKKBN, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi lintas sektor dan dukungan data yang akurat.

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Penyuluh KB berperan dalam memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok kegiatan, mengelola data keluarga, serta membangun koordinasi dengan masyarakat dan lintas sektor. Kinerja Penyuluh KB menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan mencapai hasil kerja sesuai tanggung jawab yang diberikan. Mangkunegara (2017) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas. Sementara itu, Sedarmayanti (2016) menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, lingkungan kerja, kepemimpinan, dan fasilitas organisasi. Secara khusus, Marthapati dkk. (2025) mengidentifikasi kompetensi, motivasi, sarana dan prasarana, dukungan atasan, serta kondisi wilayah kerja sebagai faktor yang dapat memengaruhi kinerja Penyuluh KB.

Keberhasilan pelaksanaan program juga berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kondisi tersebut relevan dengan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Toba. Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA), jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Toba menurun dari 13.219 peserta pada tahun 2025 menjadi 10.980 peserta pada tahun 2026, atau berkurang 2.239 peserta (16,94%). Pada tahun 2025 terdapat 21.717 Pasangan Usia Subur (PUS), dengan 13.219 peserta KB aktif atau sekitar 60,87%, sehingga masih terdapat sekitar 39,13% PUS yang menjadi sasaran potensial pelayanan dan pembinaan program KB.

Dari 16 kecamatan di Kabupaten Toba, empat kecamatan memiliki capaian peserta KB aktif di atas 60%, yaitu Kecamatan Siantar Narumonda, Borbor, Ajibata, dan Nassau. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan capaian antarwilayah dan pentingnya melihat faktor yang mendukung maupun menghambat kinerja Penyuluh KB. Kecamatan Siantar Narumonda merupakan salah satu wilayah yang memiliki capaian relatif baik. Kecamatan ini terdiri atas 14 desa dengan 832 PUS. Kondisi geografis yang didominasi dataran tinggi dan perbukitan serta karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang beragam menjadi tantangan tersendiri

dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. Sebagian masyarakat bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil sehingga pelaksanaan pelayanan dan pembinaan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Grindle (dalam Rizky dkk., 2025) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya lingkungan.

Tabel 1. Data Umum Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siantar Narumonda

No.	Kategori	Jumlah	Sumber
1	Desa	14	SIGA
2	Pasangan Usia Subur	832	SIGA Januari 2026
3	Peserta KB Aktif	564	SIGA Januari 2026
4	Peserta KB Aktif MKJP	383	SIGA Januari 2026
5	Peserta KB Aktif Non-MKJP	181	SIGA Januari 2026

Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siantar Narumonda memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui pembinaan masyarakat, kader, dan kelompok kegiatan keluarga. Kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat yang beragam menuntut Penyuluh KB memiliki kompetensi, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi yang baik. Selain pelayanan KB, Penyuluh KB juga berperan dalam pendampingan keluarga berisiko stunting, pendataan keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Penyuluh KB masih menghadapi berbagai kendala. Mawarti dan Abdurahman (2022) menemukan kendala berupa latar belakang pendidikan yang beragam, keterbatasan pengalaman dan pelatihan, ketidakseimbangan jumlah penyuluh dengan desa binaan, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan jaringan internet. Sa'adah dkk. (2025) menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh KB tergolong cukup baik, tetapi masih terdapat kendala pada kesesuaian latar belakang pendidikan, anggaran, dan teknologi. Sementara itu, Marthapati dkk. (2025) menemukan bahwa kinerja Penyuluh KB secara umum cukup baik, namun keterbatasan jumlah penyuluh dan fasilitas pendukung menyebabkan jangkauan pelayanan belum optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh KB dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi, ketersediaan tenaga, fasilitas, teknologi, serta kondisi wilayah dan masyarakat. Namun, karakteristik dan kendala setiap wilayah tidak selalu sama. Kecamatan Siantar Narumonda memiliki kondisi geografis, karakteristik masyarakat, serta capaian peserta KB aktif yang berbeda dengan

wilayah penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Penyuluh KB di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siantar Narumonda berdasarkan aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi dan upaya yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh KB pada Program Bangga Kencana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengetahui kinerja Penyuluh KB di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siantar Narumonda. Penelitian dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, selama Juni–Agustus 2026.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. Informan utama berjumlah 10 orang yang terdiri atas unsur Balai KB, bidan, kader, akseptor KB, dan kepala desa. Selain itu, terdapat 2 informan triangulasi, yaitu perwakilan Dinas PPKB Kabupaten Toba dan pihak Kecamatan Siantar Narumonda yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan dalam pembinaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayah tersebut.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan durasi sekitar 30–45 menit untuk setiap informan, disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan informan. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pelaksanaan tugas, kendala, serta faktor pendukung kinerja Penyuluh KB.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian juga memperhatikan etika penelitian melalui persetujuan informan, kerahasiaan identitas, penggunaan data untuk kepentingan penelitian, serta penghormatan terhadap hak dan kenyamanan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 10 informan utama yang terdiri atas unsur Balai Penyuluhan KB, bidan, kader, akseptor KB, dan kepala desa. Data juga diperkuat

melalui triangulasi dengan pihak Dinas PPKB Kabupaten Toba dan Kecamatan Siantar Narumonda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh KB di Kecamatan Siantar Narumonda secara umum telah berjalan cukup baik dalam mendukung Program Bangga Kencana, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Data Program KB di Kabupaten Toba menunjukkan adanya penurunan jumlah PUS dan peserta KB aktif dari tahun 2025 ke tahun 2026. Jumlah peserta KB aktif menurun dari 13.219 menjadi 10.980 peserta. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan program, khususnya melalui penyuluhan, pendampingan, penggerakan masyarakat, dan peningkatan kualitas kinerja Penyuluh KB.

Tabel 2. Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Toba Tahun 2025–2026

Tahun	PUS	Peserta KB Aktif	Suntik	Pil	Kondom	Implan	IUD	Vasektomi /MOP	Tubektomi /MOW	MAL
2025	21.717	13.219	3.116	1.470	778	2.673	970	17	3.868	43
2026	21.066	10.980	2.233	1.133	625	2.204	778	21	3.716	53

Sumber: Data SIGA Kabupaten Toba, 2025–2026.

Pada tingkat kecamatan, Siantar Narumonda memiliki 832 PUS dan 561 peserta KB aktif pada data tahun 2026, sehingga cakupan peserta KB aktif mencapai sekitar 67,43%. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi KB aktif di Siantar Narumonda relatif tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Toba secara keseluruhan. Penggunaan metode kontrasepsi di wilayah ini juga didominasi oleh metode jangka panjang, terutama tubektomi/MOW.

Tabel 3. Peserta KB Aktif Kecamatan Siantar Narumonda Tahun 2026

Indikator	Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS)	832
Peserta KB Aktif	561
Suntik	77
Pil	76
Kondom	28
Implan	63
IUD	54

MOP	0
MOW	263
MAL	0
Total metode kontrasepsi	561

Sumber: Data SIGA Kabupaten Toba, 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Penyuluh KB meliputi perencanaan kegiatan, penyuluhan dan KIE, pembinaan kelompok kegiatan, pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pelayanan KB, pendataan, koordinasi, penggerakan masyarakat, dan pelaporan. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara rutin melalui pembinaan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, KIE kepada PUS, dan kegiatan Kampung KB.

Ringkasan Kinerja Penyuluh KB Berdasarkan Lima Indikator

Hasil penelitian kemudian dianalisis berdasarkan lima indikator kinerja, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

Tabel 4. Ringkasan Temuan Kinerja Penyuluh KB

Indikator	Temuan Penelitian	Kondisi
Kualitas kerja	Penyuluhan, pembinaan, pendampingan, pelayanan, dan pengelolaan data telah dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat	Cukup baik
Kuantitas kerja	Sebagian besar kegiatan dan target dapat dilaksanakan melalui perencanaan dan koordinasi	Cukup baik
Ketepatan waktu	Beberapa kegiatan mengalami penyesuaian karena kondisi geografis, cuaca, transportasi, jaringan, dan kesibukan masyarakat	Perlu diperkuat
Efektivitas	Kegiatan memberikan manfaat terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat, tetapi pengukuran hasil jangka panjang belum optimal	Cukup baik
Kemandirian	Penyuluh dan sebagian kader mampu mengambil inisiatif, menyusun kegiatan, melakukan pendataan, dan menyelesaikan masalah	Cukup baik

Berdasarkan tabel tersebut, kualitas kerja, kuantitas kerja, efektivitas, dan kemandirian menunjukkan kondisi yang relatif baik. Sementara itu, ketepatan waktu

menjadi aspek yang masih memerlukan penguatan karena dipengaruhi oleh kondisi wilayah, transportasi, jaringan internet, kelengkapan data, dan waktu masyarakat.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas

Hambatan pelaksanaan tugas berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, transportasi, serta fasilitas administrasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi geografis, tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat, kondisi sosial budaya, keterbatasan waktu masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta jaringan internet.

Wilayah kerja yang terdiri atas 14 desa dengan kondisi geografis yang beragam menyebabkan Penyuluh KB membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi. Kondisi cuaca, jarak, dan keterbatasan transportasi dapat memengaruhi ketepatan waktu kegiatan. Selain itu, gangguan jaringan internet dapat menghambat penginputan data dan pelaporan sehingga dalam kondisi tertentu petugas menggunakan pencatatan secara manual.

Perbedaan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat juga menjadi kendala. Sebagian masyarakat dapat menerima informasi dan mengikuti kegiatan dengan baik, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan pendekatan yang lebih intensif. Untuk mengatasi kendala tersebut, Penyuluh KB melakukan kunjungan ulang, menyesuaikan jadwal, melakukan pendataan langsung, menggunakan pencatatan manual, serta berkoordinasi dengan kader dan pihak terkait.

Temuan ini sejalan dengan Mawarti dan Abdurahman (2022) yang menemukan bahwa keterbatasan jumlah penyuluh, sarana, prasarana, dan jaringan internet dapat menghambat pelaksanaan tugas. Marthapati dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga dan fasilitas pendukung dapat memengaruhi jangkauan pelayanan Penyuluh KB.

Faktor Pendukung Internal dan Eksternal

Kinerja Penyuluh KB didukung oleh faktor internal berupa pengetahuan, kompetensi, motivasi, tanggung jawab, pengalaman, kemampuan komunikasi, perencanaan, inisiatif, dan kemandirian. Kompetensi menjadi dasar penting karena Penyuluh KB harus mampu memberikan KIE, melakukan pendataan, membina kelompok kegiatan, mendampingi keluarga, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Motivasi dan tanggung jawab juga terlihat dari upaya penyuluh dalam menyelesaikan tugas meskipun menghadapi keterbatasan. Ketika data belum tersedia, petugas melakukan pendataan langsung, sedangkan ketika jaringan

mengalami gangguan, pencatatan dilakukan secara manual. Kemampuan beradaptasi tersebut menunjukkan adanya inisiatif dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Faktor eksternal meliputi dukungan Balai Penyuluhan KB, kader, PPKBD, Sub-PPKBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, sarana prasarana, pelatihan, dan partisipasi masyarakat. Dukungan Balai Penyuluhan KB terlihat melalui pemberian arahan, bimbingan, motivasi, koordinasi, dan pendampingan kepada kader maupun pelaksana kegiatan.

Kerja sama dengan kader dan tenaga kesehatan juga membantu memperluas jangkauan pelayanan. Kader memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat membantu menyampaikan informasi, menggerakkan sasaran, dan mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Pemerintah desa turut mendukung melalui penyediaan tempat kegiatan, fasilitas, dan dukungan terhadap kader.

Sarana dan prasarana seperti media KIE, buku pedoman, tempat kegiatan, alat kontrasepsi, serta perangkat pendukung juga membantu pelaksanaan tugas. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sarana tersebut masih perlu diperkuat, terutama untuk mendukung penyuluhan dan pengelolaan data. Pelatihan secara berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, memperbarui pengetahuan, dan membantu penyuluh beradaptasi dengan perkembangan program dan sistem digital.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh KB di Kecamatan Siantar Narumonda secara umum cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari terlaksananya berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, penyuluhan, pembinaan, pendampingan, pelayanan KB, pendataan, koordinasi hingga pelaporan. Temuan ini sesuai dengan konsep kinerja Robbins (2016) yang mencakup kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

Pada aspek kualitas kerja, Penyuluh KB telah mampu melaksanakan penyuluhan, pembinaan kelompok kegiatan, pendampingan keluarga, dan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan manfaat terhadap pemahaman masyarakat mengenai KB dan kegiatan pembangunan keluarga. Temuan ini sejalan dengan Mangkunegara (2017) yang menempatkan kualitas dan kuantitas sebagai bagian penting dari kinerja.

Pada aspek kuantitas kerja, sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan melalui perencanaan dan koordinasi. Namun, jumlah tenaga yang terbatas serta luasnya wilayah kerja dapat membatasi jumlah kegiatan yang dapat dilakukan secara

optimal. Temuan ini sejalan dengan Mawarti dan Abdurahman (2022) serta Marthapati dkk. (2025) mengenai pengaruh keterbatasan jumlah penyuluh terhadap jangkauan pelayanan.

Pada aspek ketepatan waktu, masih ditemukan kegiatan yang harus ditunda atau disesuaikan karena kondisi geografis, cuaca, transportasi, jaringan internet, kelengkapan data, dan kesibukan masyarakat. Dengan demikian, ketepatan waktu tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan fasilitas pendukung. Hal ini sejalan dengan Sedarmayanti (2016) yang menjelaskan bahwa fasilitas dan lingkungan kerja dapat memengaruhi kinerja.

Pada aspek efektivitas, kegiatan Penyuluh KB telah memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Namun, pengukuran efektivitas masih lebih banyak dilihat dari hasil langsung, seperti jumlah peserta dan pelaksanaan kegiatan, sedangkan perubahan perilaku dan capaian jangka panjang belum diukur secara optimal. Oleh karena itu, aspek efektivitas masih perlu diperkuat melalui indikator hasil yang lebih terukur.

Pada aspek kemandirian, beberapa penyuluh dan kader telah mampu menyusun kegiatan, melakukan pendataan, menyelesaikan masalah, serta membuat laporan secara mandiri. Namun, kemandirian belum sepenuhnya merata karena sebagian kader masih membutuhkan arahan dan pendampingan. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat aspek tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi Edward III (dalam Ramdhani & Ramdhani, 2017), temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan sumber daya menjadi unsur penting dalam mendukung kinerja Penyuluh KB. Komunikasi antara penyuluh, kader, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat membantu memperlancar pelaksanaan program. Sementara itu, keterbatasan tenaga, sarana, transportasi, jaringan, dan dukungan operasional menjadi faktor yang masih menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, kinerja Penyuluh KB di Kecamatan Siantar Narumonda didukung oleh kompetensi, motivasi, tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi, serta diperkuat oleh dukungan Balai Penyuluhan KB, kader, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Namun, peningkatan kinerja masih membutuhkan penguatan sumber daya, sarana dan prasarana, transportasi, sistem pengelolaan data, pelatihan, dan koordinasi lintas sektor. Dengan penguatan tersebut, pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siantar Narumonda dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Penyuluh KB di Kecamatan Siantar Narumonda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Penyuluh KB secara umum tergolong cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Penyuluh telah melaksanakan perencanaan, KIE, pelayanan dan penggerakan KB, pembinaan BKB/BKR/BKL, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendataan, koordinasi, serta pelaporan. Berdasarkan indikator Robbins, aspek kualitas, kuantitas, efektivitas, dan kemandirian telah berjalan cukup baik, sedangkan ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan.
2. Faktor penghambat kinerja meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, kondisi geografis dan transportasi, keterbatasan sarana prasarana, kendala jaringan internet, pengelolaan data, beban administrasi, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat yang belum merata.
3. Faktor pendukung kinerja meliputi kompetensi, motivasi, pengalaman, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, inisiatif, dan kemampuan adaptasi penyuluh. Selain itu, dukungan Balai Penyuluhan KB, kader, PPKBD/Sub-PPKBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat turut mendukung pelaksanaan tugas penyuluh.
4. Secara keseluruhan, kinerja Penyuluh KB telah mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kecamatan Siantar Narumonda. Peningkatan kinerja masih diperlukan melalui penguatan kapasitas penyuluh, pemenuhan sarana dan prasarana, perbaikan sistem data dan pelaporan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
5. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan informan dan lokasi penelitian yang terbatas pada Kecamatan Siantar Narumonda, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi kinerja Penyuluh KB di wilayah lain. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih menggambarkan pengalaman dan kondisi berdasarkan informasi dari informan, serta belum mengukur kinerja secara kuantitatif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Kecamatan Siantar Narumonda sehingga hasil penelitian belum dapat

menggambarkan kondisi kinerja Penyuluh KB di kecamatan atau wilayah lain dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Kedua, informan penelitian terbatas pada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bangga Kencana, sehingga belum seluruh penerima layanan atau masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Penyuluh KB. Ketiga, waktu penelitian yang terbatas menyebabkan penelitian belum dapat melihat perkembangan kinerja Penyuluh KB secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Keempat, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data utama berupa hasil wawancara dan observasi, sehingga belum dilakukan pengukuran kuantitatif terhadap capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi program secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Avanie, T., Retnowati, N., Widyaningrum, M. E., & Balafif, M. (2022). *Analisis Pengaruh Standar Operasional Prosedur, Finger Print dan Tata Letak terhadap Efektivitas Kerja dan Kinerja Pegawai di Universitas Darul Ulum Jombang*. Indonesian Journal of Management Science, 1(2).
- Bernardin, H.J., & Russell, J.E.A. (2013). *Human Resource Management*. New York: McGraw Hill.
- BKKBN. (2020). *Rencana Strategis BKKBN 2020–2024*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2020). *Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Bangga Kencana*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2023). *Buku Parameter Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2022*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Hidayah, M., Erpidawati, & Putri, S. A. (2023). *Gambaran Penilaian Kinerja Karyawan di RSUD Mohammad Natsir Solok Tahun 2022*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 226–231
- Khaeruman. (2021). *Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep & Studi Kasus*. Serang : CV. AA Rizky.
- Lestari, I. A., Saleh, H., & Jumarding, A. (2024). *Pengaruh Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Direktorat Operasi dan Komersial pada PT Pelindo Jasa Maritim*. Journal of Economy Business Development, 3(1)

- Mangkunegara, A.P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marthapati, N., Raudah, S., & Barkatullah, B. (2025). Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Akseptor Kb Mkp Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Al Iidara Balad*, 7(1), 192-201.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mantja. (2007). *Etnografi, Desain Penelitian Kualitatif Pendidikan dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Elang Mas.
- Mawarti & Abdurahman, A. (2022). Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana dalam memberikan Penyuluhan dan Pelayanan Konseling. *Jurnal Administrus - Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 6(2), 96-116
- Mokodompit, R. C., Hinele, R., & Juanna, A. (2026). Pengaruh Ghm Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 8(3), 457-469.
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurrahmah, A. S., Azzahra, A. L., & Wisnu, M. (2025). Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif. *Qalam Lil Athfal*, 3(2), 1-8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan nama Kabupaten Toba Samosir
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Rizkya, F., Santosa, S., & Rinayuhani, T. R. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Digitalisasi UMKM Melalui Aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4498-4507.
- Rahadi & Dedi, R. (2010). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

- Robbins, S.P. (2016). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education
- Sa'adah, H., Jumaidi, J., & Dharma, A. S. (2025). Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(1), 201-213.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawati, N. P. (2022). Pengaruh Kompetensi, Disiplin dan Kompensasi Terhadap Kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non PNS dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2), 271-278.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Mandailing Natal
- World Health Organization (WHO). (2017). *Communication for Behavioural Impact (COMBI): Toolkit*. Geneva: WHO
- Yanti, D., Agustina, A., & Erinaldi. (2025). Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Natalitas di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.37>